

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit ✓	Halaman: 04
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Bertekad Pertahankan WTP

SOPD Diminta Kooperatif dan Proaktif Sajikan Data

PALANGKA RAYA - Guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin menginstruksikan Kepala Perangkat Daerah diminta bersikap kooperatif dan proaktif memberikan data dan informasi yang akurat.

Nuryakin meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta segenap jajarannya agar dapat mempersiapkan segala urusan administratif yang diperlukan, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Saya menginstruksikan agar sementara waktu Kepala Perangkat Daerah tidak keluar daerah, kecuali ada hal yang sangat mendesak, dan harus seizin dari pimpinan," ujar Nuryakin saat menghadiri Entry

Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pemprov Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2022, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/3).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang dibacakan Sekda Kalteng Nuryakin, bahwa Pemprov Kalteng menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2022 yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng.

"Pemprov Kalteng terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh opini terbaik atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng," ucap Nuryakin.

Nuryakin mengungkapkan, atas kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah yang ada, pada TA 2021 yang lalu, Pemprov Kalteng memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK RI.

"Kami bertekad, berupaya, dan berharap agar dapat mempertahankan Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022. Melalui pemeriksaan ini kami berharap bersama BPK RI, kami dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Sementara, Kepala Subauditorat Kalteng I Tukino mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalteng menyampaikan salah satu penilaian indikator untuk Opini WTP adalah komitmen Pemerintah Daerah.

"Ketika komitmen itu dinilai oleh tim tinggi, scoring juga tinggi. Salah satu indikatornya adalah Entry Meeting. Apakah Entry Meeting itu dihadiri atau diikuti oleh seluruh jajaran," tandasnya. (ewa/fm)